

ANALISIS BIAYA TRANSAKSI PADA INDUSTRI BANK UMUM DI INDONESIA

Eko Listiyanto

Asfi Manzilati

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Abstract

The objectives of the research were to examine if there is difference in transaction costs of loan transaction in commercial bank between the period before the economic crisis in 1997 and the period after, and to identify variables influencing the costs of transaction. It was found that there was a significant difference between both periods mentioned. Variables affecting the transaction costs were overhead costs, and write off.

Keywords: *Transaction Cost, Adverse Selection, Moral Hazard, Ex Post Costs*

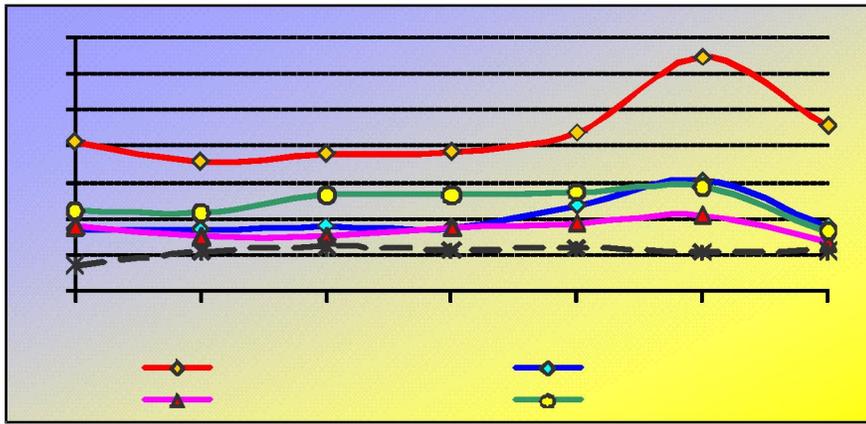
A.LATARBELAKANG

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.¹ Peranan sektor ini terletak pada fungsi utama, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Perbankan menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga keberadaannya dapat mendorong alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih efektif. Kegiatan bank menghimpun dana dan menyalurkan ke sektor-sektor ekonomi produktif akan berdampak positif bagi perkembangan investasi, proses produksi, dan konsumsi yang dilakukan masyarakat.

Mengingat pentingnya industri perbankan bagi perekonomian nasional, maka sektor ini perlu dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien. Dilihat dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, efisiensi bisa diukur dari berapa besarnya biaya transaksi yang muncul pada industri perbankan dalam melakukan aktivitas. Besarnya biaya transaksi mencerminkan desain kelembagaan yang dibuat oleh lembaga perbankan tersebut. Semakin besar biaya transaksi, maka desain kelembagaan yang dibuat oleh suatu lembaga perbankan semakin tidak efisien. Berkaitan dengan aktivitas utama yang diemban dunia perbankan sebagai lembaga intermediasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan lembaga perbankan sudah pasti akan mengganggu fungsi intermediasi. Hanya bank yang beroperasi secara efektif dan efisienlah yang akan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Dari studi yang pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti untuk menilai efisiensi industri perbankan di Indonesia (antara lain: Hadad et. al., 2003; Adhikari dan Soo-Nam, 1999) memperlihatkan masih tidak efisiennya perbankan di Indonesia. Implikasi inefisiensi industri perbankan tersebut antara lain terlihat pada goncangnya industri perbankan nasional akibat krisis ekonomi 1997. Menurut Hadad (2004:1) secara fundamental industri perbankan nasional masih lemah karena Indonesia belum memiliki kelembagaan yang kokoh serta didukung dengan infrastruktur yang memadai. Akibatnya industri perbankan Indonesia belum mampu mengatasi goncangan dari dalam maupun dari luar yang datang secara tiba-tiba. Selain itu, dilihat dari rata-rata harga dana bank umum di Indonesia ternyata belum efisien apabila dibandingkan dengan beberapa negara di Asia (Gambar 1).

¹ Pada akhir tahun 2002 perbankan menguasai sekitar 90,46% pangsa pasar sektor keuangan di Indonesia (Supriyanto, 2003; dalam Febryani dan Zulfadin, 2003:38-39).



Sumber: Kim, 2002; data diolah

Gambar 1. Perbandingan Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum pada Beberapa Negara di Asia (1993-1999)

Gambar 1 memperlihatkan bahwa harga dana (suku bunga kredit) pada bank umum di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara asia lainnya. Antara tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, suku bunga kredit bank umum di Indonesia berada pada kisaran 20,6% - 19,2%, sedangkan untuk Republik Korea dan Malaysia relatif stabil pada tingkat satu digit (masing-masing antara 8,6% - 8,8%, dan 9,1% - 8,9%). Setelah krisis ekonomi menimpa asia, rata-rata suku bunga kredit di wilayah ini mengalami kenaikan. Kenaikan paling menonjol terjadi di Indonesia, yaitu sebesar 10,4% [dari 21,8% (1997) menjadi 32,2% (1998)]. Suatu hal yang sangat kontras apabila dibandingkan dengan negara Malaysia yang hanya naik 1,1% [dari 9,5% (1997) ke 10,6% (1998)], dan Thailand yang hanya naik 0,7% [dari 13,7% (1997) ke 14,4% (1998)], sementara Republik Korea naik 3,4% [dari 11,9% (1997) ke 15,3% (1998)]. Seiring upaya pemulihan krisis ekonomi, maka pada tahun 1999 suku bunga kredit di beberapa negara asia tersebut kembali turun. Pada tahun 1999 tersebut suku bunga kredit di beberapa negara asia tersebut kembali turun. Pada tahun 1999 tersebut suku bunga kredit di Indonesia masih dua digit, yaitu sebesar 22,8%. Sedangkan ketiga negara pembanding sudah turun ke satu digit, masing-masing Republik Korea 9,0%, Malaysia 6,8%, dan Thailand 8,3%.

Melihat sejumlah fakta inefisiensi industri perbankan di Indonesia tersebut, maka studi tentang efisiensi pada industri ini masih sangat diperlukan, terutama dengan menggunakan pendekatan alternatif. Dalam hal ini pendekatan ekonomi kelembagaan dengan memfokuskan pada analisis biaya transaksi bisa digunakan untuk menilai tingkat efisiensi industri perbankan nasional. Perbankan merupakan industri yang sarat dengan ketidaksetaraan informasi (*asymmetric information*) yang berpotensi memunculkan *adverse selection*² dan *moral hazard*³. Dua hal tersebut merupakan komponen pokok yang dapat memengaruhi besarnya biaya transaksi dalam industri perbankan.

Biaya Transaksi pada Bank Umum (Tinjauan *Cost-Plus Loan Pricing*)

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang terdiri atas *ex ante* dan *ex post* costs. *Ex ante* costs terdiri dari biaya membuat draf, negosiasi, dan melindungi kesepakatan. Sedangkan *ex post* costs meliputi: 1) biaya kegagalan adaptasi (*maladaptation*) ketika transaksi menyimpang dari komitmen yang telah dipersyaratkan; 2) biaya tawar-menawar (*haggling cost*) yang muncul jika melakukan upaya-upaya bilateral untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak; 3) biaya untuk merancang dan menjalankan

² *Adverse selection* diartikan sebagai kesulitan pihak bank di dalam mengetahui prospek dari peminjam sebelum transaksi terjadi.

³ *Moral hazard* dalam konteks ini adalah kebutuhan untuk mengawasi (*monitoring*) kontrak kredit (dalam hal ini penggunaan dana oleh peminjam) setelah transaksi terjadi. Lebih jauh mengenai *adverse selection* dan *moral hazard* dalam pasar keuangan lihat R. Glenn Hubbard, *Money, the Financial System, and the Economy*, edisi 5, Addison Wesley Press, Boston, 2005: 229-239.

kegiatan yang terkait dengan struktur tata kelola pemerintahan apabila terjadi sengketa; 4) biaya pengikatan agar kesepakatan yang telah dilakukan bisa dijamin (Williamson, 1985:21; Yustika, 2006:111-112). Dalam transaksi kredit perbankan *ex ante costs* berkaitan dengan fenomena *adverse selection*, sedangkan *ex post costs* terkait dengan *moral hazard*.

Biaya transaksi pada industri perbankan dapat diukur baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, biaya transaksi bisa dihitung dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel yang diduga memengaruhi tinggi rendahnya biaya transaksi nasabah (Supranoto, 2002:34). Dari sisi penawaran, biaya transaksi perbankan dapat dihitung dengan menelusuri biaya-biaya tambahan yang muncul sebagai pembentuk (penentu) harga kredit.

Salah satu metode penentuan harga kredit yang digunakan bank adalah *cost-plus loan pricing* (Rose dan Hudgins, 2005:583; Kasmir, 2004:161)⁴, yaitu penentuan harga kredit berdasarkan harga pokok, biaya tetap, dan biaya variabel. Selanjutnya variabel-variabel tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Rose, 2002; dalam Hadad et. al., 2003:4; Perbarindo, 2005; dalam Soesilo, 2005:558):

$$i = \text{COF} + H + \pi + R \dots\dots\dots(1)$$

Di mana,

i = harga kredit π = margin keuntungan H = biaya overhead
 COF = cost of fund R = premi resiko

Variabel *cost of fund* merupakan harga beli dana, yaitu besarnya bunga yang diberikan ke nasabah yang memiliki simpanan di bank (Kasmir, 2004:151). Dengan demikian bank dalam menentukan harga dananya akan berpandangan bahwa dalam memberi pinjaman ke nasabah pinjaman tersebut diharapkan harus bisa kembali minimal bisa menutup seluruh biaya produksi, baik biaya langsung maupun *opportunity costs* untuk menghindari kerugian (Benston dan Smith Jr, 1976:215). Dengan menganggap *cost of fund* sebagai harga beli dana, maka variabel ini bukan termasuk variabel biaya transaksi, namun lebih tepat sebagai variabel biaya produksi.

Dalam suatu transaksi kredit, hampir tidak mungkin bank hanya menghendaki harga dana sebesar *cost of fund*. Sehingga muncul berbagai komponen (baca: biaya) tambahan yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan harga kreditnya. Biaya-biaya tambahan ini teridentifikasi sebagai biaya transaksi. Variabel biaya overhead merupakan variabel biaya transaksi. Suatu transaksi kredit baru bisa dikatakan selesai ketika peminjam telah melunasi semua pinjamannya, baik pokok (*principal*) maupun bunganya. Konsekuensinya, diperlukan biaya pengawasan (*monitoring costs*) untuk menilai dan menjaga kepatuhan peminjam. Biaya administrasi untuk sahnya kontrak kredit di mata hukum. Biaya iklan dan promosi (*searching costs*) untuk memasarkan kredit. Dalam usaha menjaga kepercayaan penyimpan (*lender*) dan investor, diperlukan biaya audit yang dilakukan oleh lembaga independen. Kesemua komponen biaya tersebut bagian dari biaya overhead bank, sehingga bisa dikatakan biaya overhead termasuk variabel biaya transaksi.

Variabel margin keuntungan juga merupakan variabel biaya transaksi. Sebagai sebuah industri sangat wajar apabila perbankan juga ingin mendapatkan laba dari investasi yang dilakukan. Laba yang diharapkan bank ini terkait dengan *opportunity costs* dari dana yang dimiliki bank tersebut. Pada umumnya bank akan menyalurkan kredit apabila terdapat insentif berupa laba yang nilainya lebih tinggi daripada investasi pada surat-surat berharga. Variabel premi resiko termasuk variabel biaya transaksi. Transaksi kredit biasanya diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) yang memungkinkan munculnya berbagai resiko. Bank mengkompensasi resiko ini dalam bentuk premi resiko. Semakin

⁴ Metode *cost-plus loan pricing* hanya merupakan salah satu metode penentuan harga dana di bank. Selain metode ini masih ada lagi, diantaranya *marginal pricing*; *break even pricing (target pricing)*; dan *percieved value pricing*. Lihat Kasmir, *Pemasaran Bank*, edisi 1, Prenada Media, Jakarta, 2004:161. Sedangkan Rose dan Hudgins (2005) menyebutkan antara lain *price leadership loan pricing*; *below-prime loan pricing*; dan *customer profitability analysis*. Lihat Peter S. Rose dan Sylvia C. Hudgins, *Bank Management & Financial Services*, edisi 6, Mc Graw-Hill, New York, 2005:583-590.

terbatas informasi yang dimiliki bank dalam menilai loyalitas peminjam (*borrower*), semakin besar premi resiko yang harus ditanggung oleh peminjam. Tentu saja hal ini berakibat pada semakin tingginya biaya transaksi.

B. Studi Empiris

Polski (2001) menggunakan data keuangan pada industri bank umum di Amerika Serikat dari tahun 1934-1998 untuk mengukur biaya transaksi yang dikelompokkan dalam biaya bunga dan non-bunga. Hasil penelitiannya menunjukkan biaya bunga mengalami trend peningkatan, sementara biaya non-bunga menunjukkan trend penurunan. Ketika kedua biaya ini dijumlah, ternyata menunjukkan peningkatan dari 69% dari total pendapatan bank di tahun 1934 menjadi 77% dari total pendapatan bank di tahun 1998.

Supranoto (2002) meneliti biaya transaksi nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan bentuk organisasinya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nasabah BPR yang berbentuk koperasi menanggung total biaya transaksi peminjaman terbesar, kemudian disusul BPR berbentuk Perusahaan Daerah, dan yang paling kecil biaya transaksinya adalah BPR bentuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa struktur kepemilikan memengaruhi besarnya biaya transaksi.

Datta (2003) meneliti tentang permasalahan yang muncul dalam kredit untuk petani kecil di India menggunakan pendekatan ekonomi kelembagaan dengan fokus biaya transaksi. Dari hasil penelitiannya, Datta menyimpulkan bahwa untuk kredit informal pemberi pinjaman dapat memantau berbagai atribut kredit yang diminta dari peminjam dengan mudah. Di samping itu, karena kedekatan jarak, kontrak kredit informal mudah disesuaikan. Kredit informal ternyata memainkan peran penting dan dominan dalam mempertemukan kebutuhan kredit tidak hanya bagi rumah tangga miskin (petani kecil) tetapi juga terhadap rumah tangga kaya (petani besar). Terakhir, transaksi kredit di India tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi tetapi juga oleh aspek sosial dan politik. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan pentingnya analisis kelembagaan, khususnya biaya transaksi dalam industri perbankan. Selanjutnya, untuk mengkuantifikasi biaya transaksi pada industri perbankan diperlukan suatu model yang mampu menunjukkan besarnya (magnitude) biaya transaksi tersebut.

Model

Dari rumus penentuan harga kredit (lihat persamaan 1) selanjutnya akan digunakan untuk mengidentifikasi biaya transaksi industri perbankan dari sisi penawaran. Untuk memudahkan perhitungan, *cost of fund* dalam persamaan 1 dihitung dengan rumus yang dipakai Nasution (1991:153)

yaitu, $kE + \frac{(1 - k) d}{(1 - q)}$. Sehingga rumus penentuan harga kredit menjadi seperti berikut:

$$i = \left[kE + \frac{(1 - k) d}{(1 - q)} \right] + H + \pi + R \dots\dots\dots(2)$$



Dari rumus penentuan harga kredit ini, maka perhitungan biaya transaksi dalam penelitian ini sebenarnya merupakan *spread*⁵ antara harga dana dengan biaya dana, selanjutnya dilakukan pengukuran sebagai berikut:⁶

- a. Total biaya dana (*Cost of fund*)

Adalah biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah cadangan wajib yang ditetapkan Bank Indonesia. Komponen cost of fund terdiri dari :

- Rasio antara modal dengan aktiva bank (k), merupakan proporsi modal terhadap total aktiva bank.
- Balas jasa modal (*return on equity*) (E), merupakan keuntungan bersih yang diterima pemegang saham atas investasi modalnya di bank. Return on equity dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Pendapatan bersih setelah pajak}}{\text{Total modal}}$$

- Rata-rata tingkat bunga simpanan (d), merupakan rata-rata tingkat bunga simpanan dengan periode tahunan.
- Giro Wajib Minimum (*reserve requirement*) (g), adalah Jumlah dana yang harus dipertahankan dalam rekening giro pada Bank Indonesia dalam bentuk kas.

b. Biaya overhead (H)

Merupakan biaya yang mencakup biaya administrasi dan umum; biaya personalia; biaya penurunan atas aktiva produktif; dan biaya lain-lain (termasuk di sini adalah biaya iklan dan promosi). Dihitung dari perbandingan biaya overhead bank terhadap aktiva produktif (Hadad et. al., 2003:10).

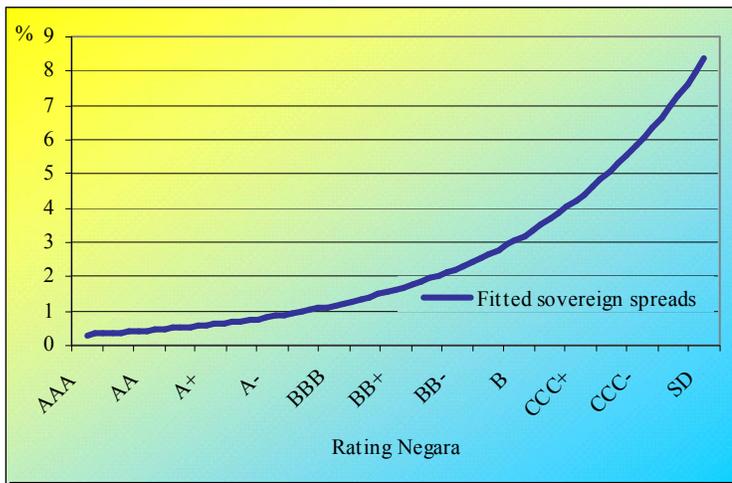
c. Margin keuntungan (π)

Berupa indikator profitabilitas yang diperoleh bank dalam periode tertentu. Diukur dengan laba sebelum pajak terhadap total aktiva (Demirguc-Kunt dan Huizinga, 1998:7; Hadad et. al., 2003:5), dengan rumus:

$$\frac{\text{Laba sblm pajak}}{\text{Total aktiva}} = \text{NIM} + \frac{\text{Pndptn nonbunga}}{\text{Total aktiva}} - \frac{\text{Overhead}}{\text{Total aktiva}} - \frac{\text{Penyisihan penghapusan kredit}}{\text{Total aktiva}}$$

d. Premi resiko (R)

Perhitungan premi resiko dalam penelitian ini menggunakan peringkat negara (*sovereign rating*). Di mana peringkat suatu negara dalam investasi dianggap sebagai nilai premi resiko dari suatu investasi. Nilai premi resiko ini ditetapkan sesuai dengan *sovereign rating*. Dalam hal ini besarnya premi resiko mengacu pada perhitungan yang pernah dilakukan Cantor dan Packer (1996:44), dan dilengkapi dengan perhitungan dari Kaminsky dan Schmukler (2002:192). Berdasarkan data *sovereign rating* yang dipublikasikan Standard & Poors dan Moody's pada bulan September 1995, Cantor dan Packer menghitung *sovereign spreads* dari selisih antara obligasi eurodollar yang ada di empat puluh sembilan negara yang dijadikan sampel (termasuk Indonesia) terhadap obligasi pemerintah U.S. (*U.S. treasuries*). Kemudian dari selisih (*spread*) tersebut setelah disesuaikan dengan rating masing-masing negara, dibuatlah kurva *sovereign spreads*. Caranya dengan membuat garis trend dari nilai *spread* obligasi yang sudah diubah ke bentuk logaritma. Karena kurva yang dibuat oleh Cantor dan Packer hanya mencerminkan nilai *spread* untuk peringkat AAA sampai B. Maka untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pernah mendapat peringkat di bawah B, kurva *sovereign spreads* diperpanjang dengan perhitungan *spread* berdasarkan rating negara yang pernah dilakukan oleh Kaminsky dan Schmukler. Gambar 2 berikut ini merupakan kurva *sovereign spreads*.



Sumber: Cantor dan Packer, 1996:44; dan Kaminsky dan Schmukler, 2002:192; data diolah.

Gambar 2. Kurva Sovereign Bond Spreads Berdasarkan Rating

C. DATADAN TEKNIK ANALISIS

Data sebagian besar diperoleh dari publikasi Bank Indonesia yaitu; Data Perbankan Indonesia (DPI), Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Direktori Perbankan Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), serta Laporan Tahunan BI. Sumber data lainnya dari Peta dan Indikator Keuangan Perbankan Indonesia, Asian Development Bank (ADB), dan dari publikasi Standard and Poors⁷. Data yang digunakan dimulai tahun 1991 dikarenakan sejak tahun tersebut mulai diperkenalkan kebijakan prudential banking melalui PAKFEB'91, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perbankan di Indonesia. Rentang waktu antara tahun 1991-2005 juga memungkinkan untuk dilakukan analisis perbandingan biaya transaksi antara sebelum dengan setelah krisis ekonomi.

Sampel yang digunakan 10 bank umum terbesar di Indonesia di tahun 2005 berdasarkan penyaluran kreditnya. Dalam kondisi bank yang menjadi sampel berdiri setelah 1991, apabila bank tersebut merupakan bank hasil merger dari bank-bank umum yang sudah ada sejak 1991 maka bisa dimasukkan dalam sampel penelitian. Namun apabila bank umum tersebut merupakan bank baru sama sekali, maka direduksi dari sampel penelitian.

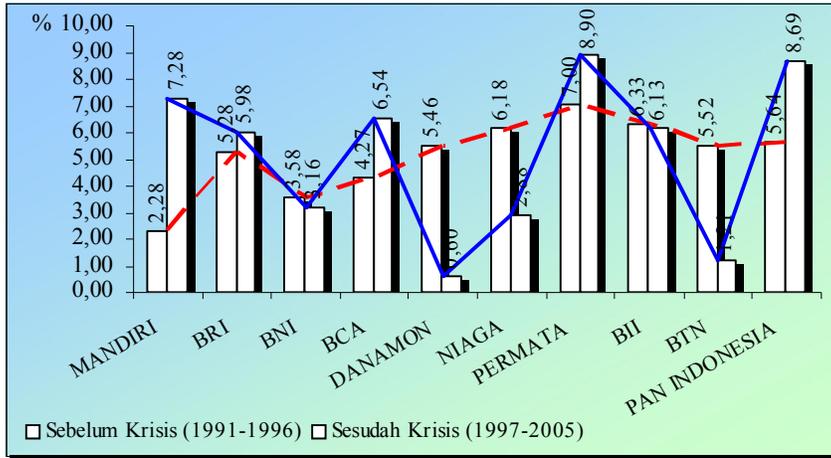
Secara umum teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis deskriptif dan analisis statistik inferen (induktif). Analisis deskriptif bertujuan untuk mencoba menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan dengan lebih jelas dan bermakna (Kuncoro:2003:172). Sedangkan statistik inferen ditujukan untuk penarikan kesimpulan dari hasil uji statistik. Sebelum uji statistik diterapkan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Apabila data berdistribusi normal, maka dilakukan uji statistik parametrik dengan menggunakan Paired sample T-test. Apabila distribusi data tidak normal maka dilakukan uji statistik non-parametrik menggunakan Wilcoxon signed rank test.

Besarnya Biaya Transaksi

Dari Gambar 3 terlihat ada lima bank sampel yang mengalami kenaikan biaya transaksi dari periode sebelum krisis ke periode sesudah krisis dan ada lima bank pula yang mengalami penurunan. Rata-

⁷ Untuk Indonesia, *Standard and Poors* melakukan pemeringkatan mulai tahun 1992. Pada tahun 1993 dan 1994, institusi ini tidak melakukan pemeringkatan untuk Indonesia, sehingga peringkat tahun 1994 berdasarkan keluaran *Moody's* tidak ada. Mengingat keterbatasan data premi resiko ini (untuk 1991 dan 1993) digunakan data *sovereign rating* tahun 1992. Pertimbangannya adalah apabila dilihat dari indikator-indikator yang digunakan *Standard and Poors* dalam menetapkan rating suatu negara, maka kondisi Indonesia di tahun 1991 dan 1993 tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 1992.

rata biaya transaksi sebelum krisis sebesar 5,15% dan sesudah krisis sebesar 5,14%. Sekilas, hasil perhitungan rata-rata biaya transaksi di kedua periode tersebut tidak jauh berbeda. Namun, dari Gambar 3 terlihat adanya perubahan karakteristik terutama dari sisi besarnya biaya transaksi untuk masing-masing bank di kedua periode. Jikalau pada periode sebelum krisis besarnya biaya transaksi relatif sama. Pada periode sesudah krisis biaya transaksi antar bank sangat berbeda. Ini mengindikasikan asymmetric information di dunia perbankan meningkat sesudah krisis.



Sumber: Laporan keuangan bank sampel dan Standard & Poors; data diolah

Dari uji beda rata-rata biaya transaksi (Tabel 1) terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata biaya transaksi sebelum dengan sesudah krisis. Namun demikian, hasil ini lebih dikarenakan cara penjumlahan biaya transaksinya. Di mana ketiga variabel biaya transaksi (biaya overhead, margin keuntungan, dan premi resiko) dijumlahkan secara langsung. Kondisi sesudah krisis menunjukkan hasil perhitungan margin keuntungan nilainya negatif (Gambar 4). Sehingga ketika hasil yang negatif tersebut dijumlahkan secara langsung dengan dua variabel lain yang bernilai positif, menghasilkan penjumlahan yang saling meniadakan. Dari hal ini, maka sebenarnya analisis biaya transaksi ini akan menjadi tidak bias apabila dilihat lebih jauh perkembangan per variabelnya dibandingkan apabila analisis hanya difokuskan pada nilai rata-ratanya saja.

Biaya Overhead

Tabel 1 memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara biaya overhead sebelum krisis dengan sesudah krisis. Dari uji statistik yang telah dilakukan membuktikan bahwa krisis ekonomi sangat memukul sektor perbankan, sehingga biaya overhead membengkak. Untuk melihat lonjakan yang terjadi, Gambar 4 dapat memberi ilustrasi perkembangan biaya overhead dari 1991-2005.

Tabel 1. Nilai Signifikansi Uji Statistik ($\alpha = 0,05$)

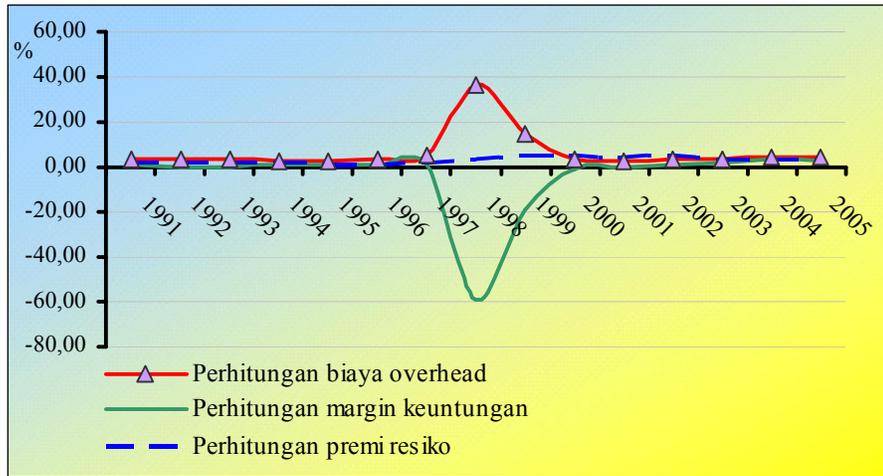
Variabel	Uji Normalitas ¹⁾		Uji Beda ²⁾
	Sebelum Krisis	Sesudah Krisis	
Rata-Rata Biaya Transaksi	0,429	0,364	0,988
Biaya Overhead	0,336	0,294	0,000
Margin Keuntungan	0,934	0,703	0,002

Sumber: Laporan Keuangan, Standard & Poors, data diolah dengan SPSS 12

¹⁾ Apabila nilai signifikansi > α , distribusi data normal, dan sebaliknya

²⁾ Apabila nilai signifikansi > α , berarti nilai variabel tidak signifikan berbeda, dan sebaliknya

Perkembangan biaya overhead pada periode sebelum krisis ditandai dengan pergerakan yang stabil antara tahun 1991-1996. Pada saat krisis melanda Indonesia, telah membuat salah satu komponen biaya overhead bank, yaitu biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) membengkak sehubungan dengan meningkatnya kredit bermasalah (Laporan Tahunan BI 98/99, 1999:91). Meningkatnya kredit bermasalah ini merupakan akibat dari turunnya perkembangan dunia usaha pada masa resesi. Kondisi ini berimbas pada naiknya biaya overhead.



Sumber: Laporan Keuangan, Standard & Poors, data diolah

Gambar 4. Perkembangan Masing-masing Variabel Biaya Transaksi

Margin Keuntungan

Hasil uji beda (Tabel 1) memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata margin keuntungan sebelum dengan sesudah krisis. Selanjutnya, berdasarkan Gambar 4 menunjukkan pada periode sebelum krisis profitabilitas bank masih memperlihatkan trend yang positif. Kondisi profitabilitas bank ini sebenarnya sudah mulai terjadi sejak dikeluarkannya kebijakan deregulasi sektor keuangan 1988 (terkenal dengan nama PAKTO 1988). Dengan melihat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya di mana industri perbankan sangat menguntungkan (*profitable*), setelah deregulasi banyak bank-bank baru maupun kantor cabang baru bermunculan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan (Santoso, 2000:13). Pertumbuhan bank baru dan kantor cabang yang terlalu cepat ini kemudian menyebabkan bank menjadi semakin agresif dalam menyalurkan kredit.

Situasi stabilnya profitabilitas bank berubah drastis saat krisis mulai mengganggu fungsi intermediasi bank, yaitu pada periode 1998-2001. Imbas dari krisis ekonomi ini adalah terkurasnya modal bank, bahkan sampai mengalami modal yang minus. Di samping itu, bank kesulitan menyalurkan kredit atas dana yang dimiliki karena lesunya dunia usaha ditambah lagi dengan resiko kredit yang meningkat.

Premi Resiko

Berbeda dengan analisis pada dua variabel sebelumnya, pada analisis variabel premi resiko ini tidak dilakukan uji normalitas maupun uji beda. Hal ini dikarenakan data premi resiko bukan data yang bersumber dari masing-masing bank umum sampel, melainkan data resiko eksternal bank yang dikuantifikasi. Dalam analisis premi resiko ini cukup dengan menggunakan analisis deskriptif untuk melihat perkembangan yang terjadi (lihat Gambar 4).

Pada periode sebelum krisis, besarnya premi resiko yang dibebankan bank terhadap harga kreditnya relatif kecil dan cukup stabil (rata-rata 1,46%). Kondisi politik yang tidak banyak mengalami gejolak dan makro ekonomi yang terus menunjukkan trend positif ikut memberi kontribusi atas kecilnya resiko yang dihadapi oleh dunia perbankan pada saat itu. Pada periode ini perhitungan resiko yang

dilakukan oleh industri perbankan lebih kepada resiko internal (resiko usaha) dengan mengacu pada Panduan Audit Bank yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Padahal panduan tersebut mengeliminir jenis-jenis resiko yang berasal dari luar usaha (*non-business risk*) [Purwosuprodjo, 1995:50]. Akibatnya, ketika Ronald Stride⁸, pada Bulan Februari 1993 mempublikasikan hasil penelitiannya yang memprediksi akan terjadinya masalah serius pada kredit perbankan di Indonesia, bank-bank di Indonesia tidak menanggapi secara serius (Santoso, 2000:18). Akhirnya pada pertengahan 1997 prediksi itu terbukti dan perbankan di Indonesia sudah terlambat mengantisipasi permasalahan kredit yang muncul.

Di awal periode krisis, premi resiko mulai mengalami peningkatan. Kecenderungan tidak membaiknya kondisi perekonomian pada saat krisis, menyebabkan premi resiko pun ikut meningkat tajam. Tingginya resiko yang dihadapi dunia perbankan pada saat krisis menyebabkan bank enggan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Bank lebih tertarik untuk berinvestasi pada aset-aset yang bebas resiko, seperti SBI dan obligasi pemerintah.

Berbeda dengan dua perhitungan variabel sebelumnya (biaya overhead dan margin keuntungan) yang langsung menunjukkan perkembangan yang membaik mulai tahun 2000. Untuk perhitungan premi resiko ini, baru mengalami tanda-tanda perbaikan pada tahun 2003. Apabila dua perhitungan variabel sebelumnya relatif lebih cepat kembali sama seperti pada kondisi sebelum krisis maka untuk perhitungan premi resiko ini penurunannya sangat lambat pada periode sesudah krisis. Di samping itu, ada kecenderungan setelah terjadi krisis premi resiko ini semakin mendapat perhatian serius di kalangan perbankan.

Dominasi Proporsi Biaya Transaksi

Untuk mengetahui variabel biaya transaksi mana yang lebih dominan (terbesar proporsinya) pada periode sebelum krisis dan sesudah krisis tidak dilakukan uji statistik. Hal ini dikarenakan ketiga variabel biaya transaksi (biaya overhead, margin keuntungan, dan premi resiko) merupakan variabel identitas, sehingga dominasi (proporsi) suatu variabel atas variabel lainnya cukup diketahui berdasarkan nilai rata-rata masing-masing variabel pada dua periode tersebut.

Tabel 2. Perbandingan Variabel-Variabel Biaya Transaksi (dalam %)

Tahun	Biaya Overhead	Margin Keuntungan	Premi Resiko
1991	3,69	1,17	1,62
1992	3,34	0,27	1,62
1993	3,06	-0,19	1,62
1994	2,72	0,47	1,62
1995	2,51	0,76	1,14
1996	3,43	1,28	1,14
Rata-rata	3,12	0,62	1,46
1997	5,50	0,88	1,86
1998	36,44	-59,08	3,83
1999	14,40	-19,37	4,95
2000	3,28	-0,53	5,03
2001	2,78	-0,24	4,42
2002	3,20	1,06	5,21
2003	3,76	1,63	3,87
2004	3,98	3,17	3,50
2005	4,03	2,35	3,32
Rata-rata	8,60	-7,79	4,00

Sumber: Laporan Keuangan Bank, Standard and Poors, data diolah

⁸ Wakil Presiden Booz Allent & Hamilton, sebuah perusahaan konsultan ternama di U.S.

Hasil perhitungan masing-masing variabel biaya transaksi (Tabel 2) memperlihatkan biaya overhead merupakan variabel yang paling dominan proporsinya terhadap total nilai biaya transaksi baik pada periode sebelum maupun sesudah krisis. Pada periode sebelum krisis terjadi ekspansi kredit secara besar-besaran guna memacu momentum pertumbuhan ekonomi yang rata-rata per tahunnya mencapai lebih dari 6% (Hadad, 2004:4). Sehingga diperlukan biaya untuk melakukan pengawasan (*monitoring cost*) dan biaya promosi dan iklan (*searching costs*) yang besar pula.

Dominasi proporsi biaya overhead ini masih terlihat pada periode sesudah krisis, bahkan rata-ratanya meningkat dari 3,12% menjadi 8,60%. Apabila diamati lebih jauh ada perbedaan karakteristik penyebab besarnya biaya overhead ini. Pada periode sebelum krisis besarnya biaya overhead relatif stabil dari tahun ke tahun. Sedangkan pada periode sesudah krisis peningkatan rata-rata yang terjadi lebih disebabkan oleh hasil perhitungan di tahun 1998 (36,44%) dan di tahun 1999 (14,40%). Hal ini diakibatkan pada tahun-tahun tersebut terjadi pembengkakan pada salah satu komponen biaya overhead, yaitu biaya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada industri perbankan di Indonesia. Membengkaknya biaya PPAP ini diakibatkan oleh banyaknya aktiva produktif yang bermasalah, khususnya kredit yang diberikan oleh bank dan ini menyebabkan kerugian operasional yang besar bagi bank. Sehingga pada saat itu bank beroperasi dalam kondisi negative spread. Di samping itu, meningkatnya moral hazard bank-bank di Indonesia sebagai akibat belum efektifnya pengawasan intern bank dan pengawasan Bank Indonesia, semakin memperburuk keadaan pada saat krisis. Nilai rata-rata biaya overhead sebesar 8,60% (sesudah krisis) sangat tidak efisien apabila dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Tenggara, di mana biaya overhead berada di kisaran 1-2% (Hadad et. al., 2003:10).

Untuk rata-rata premi resiko sebelum krisis sebesar 1,46% menunjukkan relatif kecilnya resiko yang dihadapi dunia perbankan pada masa ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kondisi makro ekonomi yang stabil dan situasi politik yang terkendali membuat dunia usaha bergairah dalam melakukan berbagai investasi. Di samping itu, pada periode ini resiko perbankan lebih difokuskan pada internal risk dengan melihat laporan keuangan yang ada, sehingga dengan dukungan laporan keuangan yang relatif baik, resiko yang dihadapi bank pun terlihat kecil.

Kondisi berbeda ditemui pada periode sesudah krisis, di mana rata-rata premi resiko naik menjadi 4,00%. Trend naiknya premi resiko membuktikan dunia usaha sebagai pengguna jasa perbankan semakin diliputi oleh ketidakpastian. Tingginya premi resiko ini juga disebabkan oleh volatilitas yang tinggi di pasar keuangan yang sangat memengaruhi kondisi perbankan dan situasi ekonomi. Dari rata-rata margin keuntungan sebelum krisis memperlihatkan nilai sebesar 0.62%. Walaupun nilai margin keuntungan relatif kecil dibandingkan dua variabel lain, tetapi karena penyaluran kreditnya terus meningkat seiring permintaan kredit dan kecilnya nilai kredit macet, maka keuntungan yang diperoleh bank menjadi besar. Dengan melihat kondisi ini, maka tidak ada yang memprediksi bahwa Indonesia akan dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti istilah yang digunakan World Bank yang menganalogikan krisis di Indonesia dengan "*the dog that didn't bark*" (Indira dan Muljawan, 1998:172).

Nilai rata-rata margin keuntungan turun drastis sesudah krisis hingga -7,79%. Nilai ini berarti untuk periode sesudah krisis bank-bank mengalami kerugian dalam investasi dananya. Kerugian yang diderita bank ini berlangsung sejak 1998-2001. Ini mengindikasikan pada saat krisis bank sulit mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan. Akibatnya, likuiditas bank menurun dan memaksa bank untuk menaikkan tingkat bunga simpanan demi mendapatkan dana dari masyarakat. Sayangnya, kenaikan tingkat bunga simpanan ini lebih cepat dan lebih tinggi dari kenaikan bunga kredit sehingga bank merugi.

D. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

1. Uji statistik biaya overhead dan margin keuntungan memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah krisis. Biaya overhead mengalami peningkatan

sedangkan margin keuntungan memperlihatkan penurunan. Sementara itu, untuk variabel premi resiko terjadi trend yang meningkat dari tahun 1991–2005. Sebagai akibat dari penjumlahan variabel-variabel biaya transaksi yang saling meniadakan, uji statistik secara agregat memperlihatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata besarnya biaya transaksi sebelum dan sesudah krisis. Melihat nilai biaya transaksi yang cukup besar di kedua periode, maka bisa dikatakan kebijakan prudential banking⁹¹ belum bisa berjalan dengan optimal.

2. Biaya overhead merupakan komponen yang mendominasi proporsi besarnya biaya transaksi di kedua periode. Sebelum krisis, besarnya biaya overhead lebih disebabkan oleh besarnya ekspansi kredit perbankan. Sedangkan sesudah krisis besarnya biaya overhead lebih disebabkan oleh meningkatnya komponen biaya PPAP sebagai akibat dari meningkatnya kredit bermasalah.

Keterbatasan

1. Metode penghitungan biaya transaksi dengan pendekatan cost-plus loan pricing ini mengandung sejumlah kelemahan, yang diantaranya pendekatan ini terlalu menggeneralisasi metode penentuan harga kredit di bank. Di samping itu, pendekatan ini menganggap spread sebagai biaya transaksi, di mana besarnya biaya transaksi yang dihitung di sini hanya mempertimbangkan komponen ex post costs bukan ex ante costs. Sehingga dalam kondisi bank mengalami negative spread dan apabila spread bernilai 0 “nol” tidak bisa diartikan tidak ada biaya transaksi sisi penawaran bank.
2. Pada dasarnya biaya transaksi yang dihadapi masing-masing individu dalam transaksi kredit bisa berbeda, walaupun metode penentuan harga kredit bank sama. Untuk itu diperlukan analisis pada tingkat mikro dalam meneliti biaya transaksi sektor perbankan ini dan akan lebih baik lagi bila data yang digunakan berupa data primer. Dengan data primer, maka berbagai kelemahan dalam penentuan harga kredit berdasarkan pendekatan cost-plus loan pricing bisa diminimalisir.
3. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, setidaknya penelitian ini bisa memberi kontribusi (terutama sudut pandangnya) dalam menilai efisiensi suatu bank berdasarkan desain kelembagaan yang dibuat, yang selama ini penilaian lebih cenderung pada metode DEA (*Data Envelopment Analysis*), ataupun metode regresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Ramesh dan Soo-Nam Oh. 1999. Banking Sector Reforms: Recovery Prospects And Policy Issues, *EDRC Briefing Notes*, Nomor 19
- Asian Development Bank. 2006. *Key Indicators 2005*, dalam www.adb.org/statistics, diakses 26 Maret 2006
- Bank Indonesia. 1999. *Laporan Tahunan BI 1998/1999*, Bank Indonesia, Jakarta
- _____. 2006. *Laporan Keuangan Bank Umum 2003-2005*. dalam www.bi.go.id, diakses 18 September 2006
- Benston, George J. dan Clifford W. Smith, Jr. 1976. A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation. *The Journal of Finance*. Vol. 31, No. 2, Mei 1976
- Cantor, Richard dan Frank Packer. 1996. Determinants and Impact of Sovereign Credit Ratings. *Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review*. Oktober 1996
- Daly, Kevin dan Marie Cavanaugh. 2006. *Sovereign Ratings History Since 1975*, Website:http://www2.standardandpoors.com/servlet/ContentServer?pagename=sp/sp_article/ArticleTemplate&c=sp_article&cid (26 Maret 2006)
-

- Datta, Samar K. 2003. An Institutional Economics Approach to the Problems of Small Farmer Credit in India, *Center for Management in Agriculture (CMA)*. Juni 2003
- Demirguc-Kunt, Asli dan Harry Huizinga. 1998. Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence, *Policy Research Working Paper*, No. 1900. Maret 1998
- Ekofin Konsulindo. 1996. *Peta & Indikator Keuangan Perbankan Indonesia 31 Desember 1991-31 Desember 1995*, PT. Ekofin Konsulindo. Jakarta
- Febryani, Anita dan Rahardian Zulfadin. 2003. Analisis Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.7, No. 4, Desember
- Hadad, Muliaman D. et. al. 2003. Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia: Apakah Bunga Kredit Bank Umum Overpriced?, *Research Paper Bank Indonesia*, Nomor 1/5
- Hadad, Muliaman D. 2004. *Arsitektur Perbankan Indonesia dan Tahap-Tahap Implementasinya Dalam Waktu Sepuluh Tahun ke Depan*. Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkritisi Arsitektur Perbankan Indonesia” diselenggarakan oleh ISEI Cabang Surabaya 2004. Surabaya
- Hubbard, R. Glenn. 2005. *Money, The Financial System, and the Economy*, Edisi 6, Addison Wesley. Boston
- Indira dan Dadang Muljawan. 1998. Memprediksi Kondisi Perbankan Melalui Pendekatan Solvency secara Dinamis. *Buletin Ekonomi, Moneter, dan Perbankan*. Vol. 1, No. 2. September 1998
- Kaminsky, Graciela dan Sergio L. Schmukler. 2002. Emerging Market Instability: Do Sovereign Rating Affect Country Risk and Stock Returns?, *The World Bank Economic Review*, Vol. 16, No. 2, 171-195
- Kasmir*. 2004. Pemasaran Bank. *Edisi 1. Prenada Media. Jakarta*
- Kim, Yun-Hwan. 2002. Financial Opening under the WTO Agreement in Selected Asian Countries: Progress and Issues. *ERD Working Paper*. No. 24
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Erlangga. Jakarta
- Nasution, Anwar. 1991. *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Polski, Margaret M. 2001. *Measuring Transaction Costs and Institutional Change in the U.S. Commercial Banking Industry*. Paper prepared for the Annual Conference of the International Society for New Institutional Economics. September 22-24. 2000. Tübingen. Germany
- Purwosuprodjo, Trenggono. 1995. *Beberapa Aspek Pengawasan dalam Proses Deregulasi Perbankan*. *Usahawan*. No.8, TH XXIV. Agustus 1995. 50-53
- Rose, Peter S. dan Sylvia C. Hudgins. 2005. *Bank Management and Financial Services*. Edisi 6. Mc Graw-Hill. New York
- Santoso, Wimboh. 2000. *Indonesia's Financial and Corporate Sector Reform. Bank Research and Regulation Directorate*. Desember
- Soesilo, Nining I. 2005. The Optimal Lending Rate of Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Maret

Supranoto, Moeroe. 2002. Biaya Transaksi Nasabah Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Perbanas*. Vol. 4, No. 1, Desember 2002:25-50

Williamson, Oliver E. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism: Firm, Markets, Relational Contracting*. Free Press. New York

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, & Strategi*. Edisi 1. Bayumedia Publishing. Malang